

# Harga Mati untuk Korupsi

Oleh: Webbi Andra, M.Pd.

**"RASA hati ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai..."**

**SEGINILAH** gambaran yang dapat dilihatnya melalui fenomena korupsi yang terjadi di negara ini. Di mana sifat korupsi dan sepihatis yang terjadi sungguh heran dan terbelak, di antara pilhan masyarakat sebagai elemen bangsa mempunyai sepihatis yang kuat untuk bersilber-silber dari daci korupsi, tetapi di pilhan para pejabat sebagai pemegang arah dan tuntutan negara lemah cenderung memajukan korupsi, sebagaimana yang sangat digemari.

Sejauh lagi yang dapat dijelaskan, temuan dan harapan bagi rakyat di negara ini, apabila para pejabatnya studi studi mengajukan korupsi sebagai jati diri dan bagian dari profesi. Sekarang para pejabat yang condong menghalalkan korupsi sebagai suatu hal yang normal dan biasa, sebagaimana dengan rakyat telah mencengkam dan mencengkam sifat rakyat yang paling dasar.

Para pejabat mulai dan akhirnya dan poli-

gai, dari ketulusan sampai cintakannya tinggi terindikasi terjebak dalam lingkaran korupsi. Para yang diharapkan secara nyata dan benar-benar memberikan pelajaran sejauh masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan inerter, malah sebaliknya lebih memerlukan kapasitas negara.

Oleh karena itu, mereka bisa dipungkiri lagi kalau pelajaran di Indonesia sangat identik dengan korupsi. Sejauh yang sebenarnya tidak rakyat menjadi pejabat. Dengan segalanya, dan sejauh yang sebaiknya biasa dapat diperolehnya dari negara. Sebenarnya selain hak yang sungguh istimewa itu, pejabat pada dasarnya juga mempunyai kewajiban yang tidaklah mudah. Gish ketua MA, dapatlah diwakilinya bahwa tidak seorang pun bisa menjadi pejabat.

Sejauh merupakannya orang-orang terpilih, yang memilihnya negara dan yang pukus sebagai penyelegara negara, pemerintahan, dan penghunganan.

Dalam sistem pemerintahan negara yang ada, terutama Undang-Undang No. 43 Tahun 1969 digambaran bahwa pemimpinan jasman di Indonesia adalah metode angkatan sipil atau politica, sepa-

tion of power, yaitu legislatif (rule-making function), eksekutif (rule application function), dan yudikatif (adjudication function). Di mana yang dimaksudkan pejabat itu adalah orang-orang yang memenuhi posisi antara lain, yaitu presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada MA serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan perwakilan; ketua, wakil ketua, dan anggota DPA; ketua, wakil ketua, dan anggota BPK; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan RI di luar negara; yang bekerjakan sebagai duta besar biasa dan berkewasa perdamaian gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/walikota; dan pejabat lainnya yang ditunjuk, undang-undang.

Memangkira keterbukaan seperti saat ini, para pejabat sebagai bagian dari rilis politik, ternyata banyak sekali yang terjebak dalam lingkaran korupsi, baik secara individual maupun berjalin. Pengelolaan yang negara yang tidak transparan merupakan faktor utama dan pertama penyebab para pejabat

terlibat tindak korupsi. Projek-projek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, ditayangkan di televisi melalui lingkungan kerja yang tertutup punya tujuan dapat dicegah. Batal saja akibat dari perbaikan tersebut, hal-hal membulatkan kesulitan pembangunan, ekonomi, serta meningkatkan sifat-sifat pelaksanaan dan pemeliharaan cepat.

Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terus berlangsung dan menghantui negara ini, maka cara satu-satunya yang harus dilakukan adalah dengan memberikan tindakan keras dan tegas terhadap para pejabat yang melakukan korupsi, yang harus sifatnya sepanasnya dan para pejabat yang berlaku korup untuk disingkirkan.

Ditambah juga, adanya komitmen bersama untuk melaksanakan arah pemerintah yang yang berdasarkan ketebukan, serta kejatuhan pengawas saat yang mengikat dan berlapis harus terus dapat ditingkatkan demi menjaga terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Selain itu ada akhirnya, dia-dia untuk seluruh kelidikan dan bisiksi Indonesia yang jujur, bersih, dan amanah, dapat berwujud dengan baik, sesuai dengan amanah yang diwujudkan Indonesia dalam memimpin jalur amikotusi sedunia.

Berani jujur itu besar, yang mana menjalankan sistem bentuk ajaikan atau bagian-sarana Indonesia untuk memerangi korupsi sebagai manusia ber-  
sama...

**Sejak jadi pejabat, makin mewah aja hidupnya Pak, apa sih resepnya...**

**Yang penting kita tidak minta uang ke rakyat langsung, kita hanya makan uang negara saja...**



# Sehat itu Mahal!

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.  
Magister Bidang Pendidikan Bahasa,  
Sastra Indonesia dan Daerah

Tangisan untuk Negeri

Hitam negeriku,  
negeriku, negeri hitam  
tidak ada cahaya di sana  
semuanya hitam, kelam tanpa warna

Apakah masih ada cinta di negeriku?  
cebalah kau tanya pada kerut  
wajah tua di lorong sana  
dan dengarkanlah dirinya bercerita  
tentang senyum anak-anakku. Jelata  
atau duka nestapa anak-anak para  
janda

Oh, kenapa negeriku ini?  
sedih terikut bala bala  
terikut pas larut gelombang derita  
ini pasti ah salah para durjana!  
pengikap darah rakyat jelata  
pengikis habis jiwa di dada

Dari apa yang bisa aku buat?  
aku hanya lahan kering  
kumpulan sampah tak berguna  
hanya bisa burundi air mata  
moga cahaya cinta Tuhan di jiwa  
jatuh menembus jati negeriku  
yang merana...

BANGSA yang kuat, tentu saja adalah bangsa yang sehat. Negara bersama-sama perlu dari kesehatan, sampai-sampai lahir satu semboyan 'lebih baik mencegah dari pada mengobati'. Lebihnya semboyan 'lebih baik mencegah dari pada mengobati' di kalangan masyarakat Indonesia, diaebabkan istilah 'saku' sangat idiomik dengan biaya yang masih. Stigma tersebut sungguh telah berduri-duri hingga di dalam masyarakat dengan perspektif bahwa orang miskin itu dilatar kerak untuk

sakit. Hal ini muncul, dikarenakan tidak terjangkunya biaya kesehatan bagi golongan masyarakat kelas bawah.

Melihat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan belum terbaik. Maka sudah sepatutnya bagi petugas yang mencari, untuk mengedepankan suatu program kesehatan gratis bagi segenap masyarakat.

Melalui program kesehatan gratis ini, diharapkan nantinya masyarakat akan memiliki satu jaminan kesehatan yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja apabila diperlukan, baik di lingkungan rumah sakit maupun di pusat kesehatan masyarakat. Di mana jaminan kesehatan gratis ini, merupakan kunci penting untuk menjalin kemerdekaan suatu masyarakat Indonesia yang kuat.

#### Pelayanan Prima

Mewujudkan Indonesia sehat merupakan harapan, dan beban, impian, dan cita-cita kita bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu terobosan jauh di luar kesehatan, yaitu berupaya reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan merupakan cara terbaik untuk menghindari bentuk pelayanan kesehatan yang lemah, menjadi bentuk pelayanan yang prima.

Pelayanan prima (excellent service) merupakan bentuk pelayanan yang paling baik yang dapat diberikan suatu lembaga/organisasi terhadap pelanggan yang dibutuhinya (pelanggan). Dikatakan paling baik, dikarenakan pelayanan prima yang ada tetapi memiliki standar pelayanan yang baik dan berjaya secara umum. Di mana pelayanan prima tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk dapat menembak kepuasan yang baik sejauh dengan harapan pelanggan, tanpa ada faktor-faktor yang harus menyalihkan (Satyo dan Suryana, 2006).

Lembaga Administrasi Negara (2006) berpendapat, bahwa kriteria-kriteria utama yang harus terpenuhi dari suatu bentuk pelayanan prima, antara lain:

a) Kesehatan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, serta mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan.

b) Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang terjadipertahankan dan

menjaga saling ketanggungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, toliti dalam pencatatan, dan tepat dalam hal waktu.

c) Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelajaran sesuai dengan urutan waktunya, serta menghubungi pelanggan secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan.

d) Kocak-capa para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

e) Pendekatan kepada pelanggan dan kemandirian kontak pelanggan dengan petugas, petugas pelayanan harus mudah diburu oleh pelanggan, tidak hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperbaiki.

f) Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan dalam kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya diperlukan jika pelanggan termasuk dalam konsumen khusus. Sebaliknya, pihak penyedia layanan tidak perlu menerapkan keramahan yang berlebihan jika layanan yang diberikan tidak dikonsentrasi pada pelanggan melalui kontak langsung.

g) Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gamblang, meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu dan cara esai, biaya, dan lain-lain.

h) Komunikasi antara petugas dan pelanggan, komunikasi yang baik dengan pelanggan adalah bahwa pelanggan juga memperoleh informasi yang berbalik diambilnya dari penyedia pelajaran dalam halnya yang mereka incogniti.

i) Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan penyedia pelayanan, adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak dipercaya, adanya kejujuran kepada pelanggan, dan kemampuan

penyedia pelayanan untuk menjaga pelanggan tetapi setia.

j) Kejelasan dan kepastian, yaitu mengenai tata cara, biaya layanan dan tata cara pembayarnya, serta jadwal dan waktu pencucian layanan tersebut. Hal ini sangat penting karena pelanggan tidak boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang diberikan.

k) Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bahas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan kerugian-kerugian lainnya yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, finansial, dan kepercayaan pada diri sendiri.

l) Mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan, hal ini dapat dilakukan dengan berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Mengerti apa yang diperlukan pelanggan sebenarnya tidaklah sukar. Dapat dimulai dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang diinginkan pelanggan dan memperbaiki perbedaan secara pribadi.

m) Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas yang baik, adanya petugas yang melayani pelanggan, pelayanan yang digunakan dalam memberikan pelayanan, kartu pengeluaran, dan fasilitas penunjang lainnya.

n) Efisiensi, yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat langsung dengan pelayanan, sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.

o) Ekonomis, yaitu agar pengguna biaya pelayanan harus diterapkan secara wajar dengan memperbaiki nilai barang/jasa dan konsistensi pelanggan untuk membayar.

Melalui pelaksanaan pelayanan prima yang baik, terhadap citra dan misi ke depan dari penyedia yang mereka gunakan untuk menjalankan keberadaan Negara Indonesia yang sehat. Di mana hal tersebut, sangat berguna untuk mempertahankan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejalan dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. (\*)

# 3 Pilar, Pemimpin yang Merakyat!

**"Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada, dari, oleh, dan untuk rakyat. Begitulah sebaiknya tujuan dan tekad hidup dari pemimpin yang merakyat."**

**Oleh Vebbi Andra, M.Pd.**

TENTU saja selama ini hanya masyarakat yang hortinya-tanya, apakah yang menjadi tolak ukur untuk menyatakan suatu pemimpin dapat digolongkan sebagai good governance atau tidak? Pertanyaan tersebut, sebenarnya sangat mudah untuk dijawab oleh berbagai elemen aparat penegak hukum di negara ini.

Suatu pemimpinan dapat digolongkan sebagai good governance jika ia yang sanggup jusih ambil peran dalam mewujudkan oleh pemimpin yang merakyat. Dimana sebenarnya pemimpin tersebut merupakan bagian dari aparat negara yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat, sejauh ini pemimpin, juri, ahli, dan masyarakat dalam fungsi mereka sebagai penyelegara rasa negara, berorientasi, dan berhengkuran.

Mewujudkan good governance bukanlah suatu perkara yang mudah. Oleh karena, hal ini memerlukan suatu ketertiban yang kuat, daya tahan yang lama, dan waktu yang tidak singkat dalam proses pembelaian, penegakan, serta implementasi dari nilai-nilai kita ke pemimpin yang ada di dalam seluruh elemen bangsa, baik dari aparat penegak hukum ataupun masyarakat.

Wawasan kedua ini yakni, ketarifan dan transparansi (open-

ness and transparency), partisipasi masyarakat (participation), tanggung gugat (accountability), supremasi hukum (rule of law), demokrasi (democracy), profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency), daya tanggap (responsiveness), keefisienan dan keelokan (efficiency and effectiveness), desentralisasi (decentralization), kerjasama dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership), komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality), kebijakan pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection), dan komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market), merupakan unsur-unsur penting yang harus tergambar dalam suatu good governance (Bappenas).

Di era sekarang ini good governance, yang menggariskan visi dan misi dari pemimpin yang merakyat, tentu saja tercetus secara keseluruhan melalui tiga pilar pembangunan, yaitu berupa pendidikan yang gratis, kesehatan gratis, dan ekonomi merakyat. Dimana melalui pelaksanaan yang efektif dan inovatif untuk terhadap tiga pilar ini berlaku diperlukan teknologi yang canggih dan inovatif.

## Pendidikan Gratis

Pendidikan merupakan sarana-sarana cara untuk memfasilitasi manusia, atau sari-saranya cara untuk membangun manusia sebenarnya. Pendidikan merupakan tanda siklus antikimanerasi manusia, baik dari aspek pengetahuan (cognitif), aspek sikap (afektif), maupun aspek keterampilan (psikomotorik), bagi peranannya memiliki dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Unesco mencatatkan bahwa untuk mendidik sebenarnya berlumput pada learning to know (berorientasi pengetahuan), lardasen atau pengetahuan, learning to do (berorientasi akterial), aplikasi, learning to be (berorientasi akterial), pengalaman polosan, dan learning to life (berorientasi keseharian) dan sebagainya. Dengan berorientasi pada

dan bersahabat antarbangsa.

Begitu pentingnya pendidikan, maka suatu bentuk pemerintahan yang baik (good governance), seharusnya akan memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan, baik dari segi materiil maupun nonmateriil. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki fungsi yang amat besar untuk memberikan kesadaran kepada manusia tentang kebenaran-kebenaran hidup, memberikan kegembiraan dan sepasian batin, mampu menimbulkan kehigienan secara universal, dapat memenuhi kebutuhan terhadap natur kebutuhan, dapat memberikan penghargaan yang mendukung terhadap apa yang diketahui, dan bahkan dapat memudahkan manusia itu sendiri menjadi manusia yang berbudaya, yakni manusia yang responsif terhadap nilai-nilai keluargan budi (Susilu, 2007).

Melihat sangat besarnya peran pendidikan bagi kepentingan bangsa dan negara, maka sudah tentu dan sebagaimana kita ketahui bahwa manusia yang kuat, tentu saja menjadi pilar-pilar pembangunan di suatu negara. Agar memenuhi kebutuhan ekonomi, maka diperlukan suatu kejernihan bagi pemimpin yang merakyat, untuk melahirkan suatu program yang berbasis pada ekonomi merakyat.

Economik merakyat ini yakni program canggih, guna untuk mendukung pembangunan masyarakat, agar dapat mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 1945.

## Kesehatan Gratis

Bangsa yang kuat, tentu saja adalah bangsa yang sehat. Begitu bessaranya peranan dari kesehatan, supaya sangguplah kita selalu semakin "lebih baik menegakkan dunia dan menghafal". Semakin inti manusia cibubukan iulalah "sakit" sangat (derita) dengan bisea yang malah Stigma yang berakibat bangsa di masyarakat merasa takutnya orang-orang tidak itu dilakukannya semakin sulit. Hal ini tentu, dikarenakan oleh sanggup mengakibatkan faktor terjangkunya masyarakat bagi kesehatan masyarakat.

Salah tiga pilar pembangunan, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan ekonomi merakyat, terlindungi visi dan nilai ke depan oleh pemimpin yang merakyat. Dalam hal ini juga sangatlah penting untuk memperbaiki kesehatan masyarakat yang sejauh ini sedang dalam masa krisis pada pendidikan dan kesehatan. (7)

Melihat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan begitu sulit dan terbatas. Maka suatu sungguh pas dan sepatutnya bagi pemimpin yang merakyat untuk mengelepasikan suatu program kesehatan yang gratis bagi segenap masyarakat.

Melalui program kesehatan gratis ini, diharapkan nantinya masyarakat akan memilih satu jaminan kesehatan yang lengkap dan dapat digunakan sepanjang sejauh apabila diperlukan, baik di tingkat Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), rumah RS (Rumah Sakit), Dimana jaminan kesehatan gratis adalah hasil utama dan pertama serta merupakan kunci penting untuk menjamin keberadaan suatu masyarakat yang sehat.

## Economik Merakyat

Pembentukan ekonomi merakyat kunci penting keberhasilan dari pembangunan ekonomi yang kuat, tentu saja menjadi pilar-pilar pembangunan di suatu negara. Agar memenuhi kebutuhan ekonomi, maka diperlukan suatu kejernihan bagi pemimpin yang merakyat, untuk melahirkan suatu program yang berbasis pada ekonomi merakyat.

Economik merakyat ini yakni program canggih, guna untuk mendukung pembangunan masyarakat, agar dapat mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 1945. Untuk sarana dan pelaksanaan ekonomi merakyat adalah berfokus terhadap UKM (Usaha Kecil dan Menengah), yaitu berupa bantuan dana untuk pengembangan UKM sebesar 100% perkebutuhan desa. Dengan berfokus terhadap program ekonomi merakyat, diharapkan masyarakat masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, guna untuk memperbaiki iklim keberadaan bangsa dan negara yang kuat.

Salah tiga pilar pembangunan, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan ekonomi merakyat, terlindungi visi dan nilai ke depan oleh pemimpin yang merakyat. Dalam hal ini juga sangatlah penting untuk memperbaiki kesehatan masyarakat yang sejauh ini sedang dalam masa krisis pada pendidikan dan kesehatan. (7)

# Pesan Guru untuk Pendidikan

"MENJADI harapan kita bersama untuk menghadirkan pendidikan Indonesia yang bermutu, dalam rangka menyiapkan generasi muda yang profesional pada masa depan, generasi yang siap bersaing pada era globalisasi."

Oleh: Nohbi Andre, M.Pd.

PENDIDIKAN adalah upaya pertama dan utama untuk membangun manusia seutuhnya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan manusia, baik dari aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif), maupun aspek keterampilan (pekarmonian), bagi perserangkaian dalam kehidupan bersama di dalam negara.

Untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, memperbaikan teknologi pendidikan seharusnya bertujuan pada *extending to know* (belajar untuk mengenal), *fundasi dan pengetahuan, tentang so as to develop man's work potential, learning to be (selain untuk menjalankan pengalaman potensi diri), dan learning to live together (hidup berdama dan sekaligus berkompetisi, hidup berdama dengan dan bersahabat bersama).* Begitu peningkatan pendidikan, maka suatu kebutuhan pengetahuan yang baik (good governance), seharusnya akan mampu memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan, hal-hal seperti materiil maupun nonmateriil.

Bah ini diketahui pendidikan merupakan fungsi yang sangat besar untuk memberikan kesadaran dan cinta marwah tentang kebenaran, ketenaran dan kepuasan hati, mampu menunjukkan keleluasaan secara universal, dapat mengambil solusi dan berbaik nafari sekaligus dapat membentuk pengalaman yang memudahkan terciptanya yang etis, dan bahan yang dapat mendukung manusia itu sendiri membangun masyarakat berbudi daya, yakni manusia yang berbudi daya, yakni manusia yang responsif terhadap nilai-nilai keleluasaan (Sastri, 2007).

Melain, sangat kesadaran peran pendidikan bagi kepentingan keadaan dan negara, maka sudah patut dan

sejaya bagi pemerintahan yang baik (good governance) untuk memenuhi suatu program pendidikan yang tinggi bagi pengetahuan manusia, baik dari jenjang SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan FT (Fakultas Umg). Hal ini sangat diperlukan untuk menjalin pemerintahan mutu pendidikan yang siap bagi sebagian masyarakat Indonesia, sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 1945. Dua faktor penting yang menjadi kunci sukses keberhasilan dunia pendidikan, adalah terletak pada keterselebaran guru yang profesional dan juga adanya sarana-prasarana yang benar-benar.

## Guru Pahlawan Hati

Guru yang hebat adalah guru yang profesional (guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan keilmuan). Di mana tujuan utama adalah mendidik, mengajari, membimbing, mengarahkan, melahirkan, memelihara dan mengelusasi peserta didik. Menurut Sudarwan (2010) seorang mutu guru haruslah memiliki kompetensi dasar utama, hal-hal:

1) Kompetensi pedagogik (2) memahami peserta didik secara mendalam (memahami peserta didik dengan memahami prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memahami prinsip-prinsip kebersaudaraan; dan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik), (3) mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan peserta didik, (4) mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan peserta didik dan tenaga kependidikan (mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan peserta didik dan mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar (5) mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan peserta didik sekitar, dan (6) menguasai teknologi dan metode keilmuan (menguasai lingkup-lingkup pengetahuan dan kajian kritis untuk memperoleh pengalaman materiil bahan).

Begitu besarlah peran guru bagi kemasuhan dan pendidikan Indonesia, maka suatu patuh dan selalu ikut bagi pengetahuan yang baik (good governance) untuk memberikan perturuan yang sangat khusus kepada guru. 2) yang berarti program-program guru, peningkatan mutu guru (kompetensi guru), maupun program-program yang digunakan dalam rangka meningkatkan dan mendukung diri guru. Karena seharusnya, profesionalitas seseorang guru akan membeli apabila keilmuan hidupnya telah terpenuhi dengan baik.

## Sarana-Prasarana Berkaitan

Selain keberadaan guru yang profesional, sarana-prasarana yang

untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik).

2) Kompetensi kepribadian: a) kepribadian yang mantap dan stabil (bertindak sesuai dengan norma humanis, bertindak sesuai dengan norma sosial dan humanis sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma), b) kepribadian yang siap (memimpulkan tindakan yang cocok dengan kompetensi peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta mencantumkan keterfungsian dalam berpikir dan berlindung), c) kepribadian yang berwibawa (memiliki pendidikan yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perlakuan yang disegani), dan d) berwibawa mulia dan dapat menjadi teladan berlindung sesuai dengan norma religius (senang, tulus, juju, ikhlas, dan suka menolong dan memiliki perlakuan yang dihargai peserta didik).

3) Kompetensi sosial: a) mampu berkomunikasi dan berbagi dengan peserta didik (berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, b) mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan peserta didik dan tenaga kependidikan (mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar (4) mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar (5) mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan peserta didik sekitar, dan (6) menguasai teknologi dan metode keilmuan (menguasai lingkup-lingkup pengetahuan dan kajian kritis untuk memperoleh pengalaman materiil bahan).

Begitu besarlah peran guru bagi kemasuhan dan pendidikan Indonesia, maka suatu patuh dan selalu ikut bagi pengetahuan yang baik (good governance) untuk memberikan perturuan yang sangat khusus kepada guru. 2) yang berarti program-program guru, peningkatan mutu guru (kompetensi guru), maupun program-program yang digunakan dalam rangka meningkatkan dan mendukung diri guru. Karena seharusnya, profesionalitas seseorang guru akan membeli apabila keilmuan hidupnya telah terpenuhi dengan baik.

berantai juga merupakan kunci penting keberhasilan dunia pendidikan. Sarana-prasarana yang baik tentunya menjadi pempari utama pendidikan di suatu negara. Agar memunculkan suatu keunggulan dari dunia pendidikan, maka diperlukan sarana keberhasilan bagi peserta didik yang baik (good governance), untuk menjaminkan ketersediaan sarana-prasarana yang jitu bagi kesuksesan dunia pendidikan Indonesia.

Menurut Sudarwan (2010) sarana-prasarana yang harus tersedia guna memajukan keberhasilan dunia pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Jenis dan jenjang pendidikan: tersedia jenjang dan jenjang pendidikan dengan beragam aspek dan disiplin ilmu yang tidak hanya kompetitif, akan tetapi juga resif serta dengan yang diwakilkan negara lain.

2) Masa pendidikan (waktu proses dan jurnal penelitian secara nisbi sejara dengan mutu acjenis yang dicapai di negara lain).

3) Sumberdaya (tersedia sumberdaya internal dan eksternal pendidikan yang mencakupi keterlakukannya kualitas dan kuantitas).

4) Loko belajar: tersedia pusat pertambahan buku yang lengkap dari berbagai jenjang pendidikan.

5) Sumber informasi (tersedia pusat informasi yang lengkap, efektif dan terperoleh).

6) Lingkungan belajar (terdapat lingkungan belajar kondusif).

7) Kondisi politik dan ekonomi masyarakat (dari yang kondisi politik dan ekonomi masyarakat yang baik).

8) Jaringan informasi (tersedia jaringan informasi yang luas).

9) Banyak hibah dan pembiayaan (diketahui pembiayaan dan bantuan hibah yang relatif terjangka).

10) Sarana transportasi (tersedia sarana transportasi yang baik dan terjangka).

11) Dukungan teknologi komunikasi yang kuat dari berbagai pihak untuk kepentingan pendidikan.

12) Pengakuan internasional (pada pengakuan yang baik dari berbagai negara atas hasil dan mutu pendidikan).

Selanjutnya keberadaan guru yang profesional dan sarana-prasarana yang berada di dalam dunia pendidikan di Indonesia akan akan terwujudkan bila di bawah dasar UUD 1945, yaitu menghasilkan peserta didik yang cerdas, bertaik, jujur, dan amanah, serta dapat menciptakan kelompok masyarakat Indonesia yang aman dan sukses. (\*\*\*)

# Dilema Kekuasaan

*“Seperti menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berserakan. Begitulah selayaknya seorang pejabat menjalani proses kepemimpinannya.”*

Dieh Mehbhi Andra, M.Pd.

SIAPA yang tidak mau, menjadi pejabat? Dengan gaji, tunjangan dan fasilitas yang serba luar biasa dapat diperolehnya dari negara. Sebenarnya selain hak yang sangat istimewa ini, pejabat pada dasarnya juga memiliki kewajiban yang tidak seumur jagung.

Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi pejabat. Pejabat mestikapakar orang yang berilmu, yang mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai penyelenggara negara, pengembang dan pembangun.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 memperkenalkan bahwa yang dinamakan pejabat itu adalah orang yang yang memenuhi posisi sebagai presiden dan wakil presiden ketua wakil ketua dan anggota MPR ketua wakil ketua dan anggota DPR ketua wakil ketua ketua wakil ketua dan hakim agung pada MA serta ketua wakil ketua dan hakim pada sejumlah badan peradilan ketua wakil ketua dan anggota DPK menyeri dan jabatan selanjutnya menteri kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai calon hakim biasa dan berkena penalti gubernur dan wakil gubernur anggota wakil kota dan wakil kota yang mendapat vote dan perolehan suara yang diungkap pada undang-undang.

UU No. 43 Tahun 1999 tersebut menggunakan bahasa yang jelas, bahwasannya peningkatan kekuasaan dan jalur dan d. Indonesia menggunakan prinsip dan pola kerajaan yang

power, yaitu legislatif (legislating function), eksekutif (rule application function), dan yudikatif (adjudication function).

Peningkatan kekuasaan berdasarkan trias politica dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik oligiter dan absolutisme dalam ranah birokrasi. Trias politica dibangun agar memiliki fungsi check and balance yang suatu dan yang lain antar jembatan. Islam mengajari melaksanakan pemimpinan ala

Akhir-akhir ini tress politica sebagai prihatin ke negara terasa sangat terdapat - sejalan keadaan keadaan negaranya. pejabat baik dari kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tergebrak ke dalam lembah amnesia beranda. halweg pelaksanaan tress politica ini akhirnya sistematisasi.

Pada pejabat atau di daerah tuju, saja kecuali di kantor yang paling berkrat tinggi di ibu kota, termasuk kasi terjejak dalam lingkaran KKN (Kompsi), kolesi dan Nepotism. Pejabat yang diangkat sebagian besar memperoleh pelayanan kerja dari masyarakat secara pribadi sebaliknya di kantor merata, tidak selalu berlaku tetapi bukan dengan keringkan sepeninggalan pejabat dari jadi kepentingan. a.YPT

Pengelolaan yang menggunakan teknologi informasi berupaya mencapai tujuan dalam penyelesaian permasalahan yang berjalan berulang. Dalam penyelesaian permasalahan yang berjalan berulang, teknologi informasi berupaya mencapai tujuan dalam penyelesaian permasalahan yang berjalan berulang.



La nostra differenza

Betul saja akibat dari perputaran tersebut, hal hasil memungkinkan ketulian peribangunan, akar-akar, serta memburuk kualitas pelajaran yang diinginkan oleh para lembaga.

Opsi ini mewakili yang bogata besar menggambarkan bahwa pada masa sekarang ini sangatlah banyaklah yang mudah mencuci kaki sejauh yang antagonis, ketimbang menemukan pejabat yang berminat.

Stigma masyarakat, teori tentang kebiasaan yang jelas ini tentu saja diperkuat dengan pararuan bahwa banyaknya mata pelajaran yang mengalih fungsi dan pengetahuannya, dari yang akademik sebagai wali agama dan sebagainya dan sekolah yang herbalistik menjadi aneh untuk orang sapa dan rakyat.

Berikut begitu studi yang sangat penting dan relevansinya, pada gejala yang berakibat pada cilius tidak diketahui dan cilius ini akan kehilangan jernih tahannya dengan waktu

MANVILLES & JONES LTD.

• Mereka yang rela memperbaiki batiknya harus membayar devisa modal siapa yang tidak diperbolehinya. Hidup dan kerja dan regas terhadap pekerja yang sumpah batik dia tidak demikian menjalani kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara lagi. Oleh karena itu

1. ejabat yang bersila suci, jeliyah, ya diaresias, sedang-kat, pejabat dia yang seseorang sudah seputaranya untuk diberantas. Kesi kesan perhentian dan ko-ru-pi di sini yang percut, sumber pentingnya adalah terletak pada ikhtisar dan adanya benar dan bersama-sama untuk melaksanakan reformasi berasasi kepada pengaruh yang mengisak, bebas dan tanpa spahat edar dan para pengusa. Dengan begitu, tidak akan merentnya Edex ada lagi pertolongan yang mampu dilakukan masyarakat mengenai apa pun di sekitar pejabat dan para penjabat. Semoga... [4]

# Guru Pahlawan Hati

Oleh Webbhi Andra, M.Pd.

**GURU** adalah komponen pokok yang utama dalam roda tumbuhan manusia secara umumnya. Dengan kata lain, guru mempunyai fungsi penting dalam proses pertumbuhan manusia, baik dari aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (aestif), maupun aspek keterampilan (pelkomotifik), bagi perkembangan manusia terutama di masa depan.

**GURU** adalah pahlawan hari, telah mengupas tulen yang dapat dihirau; negar ini susah pernah lepas mereka dalam proses membangun bangsa. Diguguk dan ditiru merupakan makna penting yang terkandung dalam hakikat guru itu sendiri. Diguguk dan ditiru dipahami bahwa guru menciptakan sumber yang terpercaya dan dapat dipercaya, mengangkat diri menghindung setiap yang menggambarkan bahwa guru merupakan sumber teladan yang selalu pantas untuk

Guru merupakan salah satu profesi yang mempunyai tugas yang sangatlah mulia. Oleh karenanya, diperlukan disiplinisme bahwa tidak semua orang bisa menjadi guru. Guru merupakan orang-orang pintar yang memiliki kedidikan dan peran pokok sebagai pendidik dan pengajar dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang profesional di masa depan, generasi yang siap bersaing pada era globalisasi.

bettsai, kesadaran kepada peserta didik mengenai keberadaan-sebenarnya hidup, mempercayai peserta didik kegagahan dan kepuasan hidup mampu menunjukkan kepada peserta didik yang berkemampuan secara universal, dapat memenuhi kebutuhan peserta didik terhadap diri hukum keindahan, dapat memberikan peserta didik penghayatan yang kuat dan terhadap apa yang diajukan, dan bahkan dapat menolong peserta didik itu sendiri menjadi manusia yang berdaya, sakti manusia yang respon terhadap nilai-nilai kebaikan dan kejayaan.

Sebagian besar perihal menyajikan pesan didik, guru pada dasarnya mengemban tugas untuk memfasilitasi pendidikan, yaitu: 1) learning to belief (belajar kepercayaan), 2) learning to know (belajar untuk mengenali), dan dalam rangka mendidik, 3) learning to do (belajar untuk bekerja, aplikasi), 4) learning to be (belajar untuk membangun pengalaman perencanaan diri), dan 5) learning to life together (belajar untuk hidup bersama dan sebagaimana bersama-sama), sedangkan bentangan dan islam adalah

Guru yang hebat pada dasarnya adalah guru yang profesional, guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan kilmuan. Ditinjau tugas utamanya adalah mendidik, mengajari, membimbing, mengarahkan, melihat, merillat, dan mengajarkan peserta didik. Menurut Sudarwan (2010) secara umum guru berusaha memiliki kompetensi dasar manusia berikut:

2) Kompetensi pedagogika  
a) Memahami peserta didik secara mendalam (memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif memahami peserta didik dengan

mengandungkan prinsip-prinsip keprihatinan, dan mengidentifikasi bahan-bahan awal peserta didik).

5) Melancarkan pembelajaran, memusatkan kecemasan pada fondasi pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, memahami fondasi kemendikbud, memperbaiki teori belajar dan pembelajaran, merencanakan strategi pembelajaran, merendahskan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, dan

menyusun rencana pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

3) Merencanakan dan melaksanakan evaluasi pentbelajaran (merencanakan, evaluasi/assessment proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menggunakan hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk meningkatkan kognitivitas proses belajar, mastery learning, dan memfasilitasi hasil pentbelajaran, pembelajaran untuk pertumbuhan, kualitas program pembelajaran dan hasil belajar).

el Mengentangkan peserta didik untuk mengakrualisasi berbagai potensialitas (mengfisilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik).

## 2) Knenpecensi keprilbadian:

3) sepelehan yang bertindak dan simpatik tidak sesuai dengan norma, hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial dan bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

b) Kepribadian yang aktif (memungkinkan tindakan yang didasarkan pada kemauan peserta dalam sekelebih dan manuksesanya)

menunjukkan kerentakkan dalam berakir dan berlindang).

c) Kepribadian yang berwibawa (memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani).

d) Berakhlak roulette dan dapat menjadi teladan (bertingkah sesuai dengan norma religius/Iman, takwa, jejur, ikhlak); dari seku menyalang, serta memiliki perlakuan yang cinta kepada peserta didik.

### 3) Kompetensi sosial:

a) Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik (berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik).

3. Mampu berkomunikasi dan bengaul secara efisif dengan sesama pendidik dan teraga kependidikan (mampu berkomunikasi dan bengaul secara efisif dengan sesama pendidik dan mampu berkomunikasi dan bengaul secara efektif dengan teraga kependidikan).

c. Mampu berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan mampu memberi tahu/mengupayakan perbaikan dan berbagi secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan mampu berkomunikasi dan berbagi secara

e) Efektif dengan masyarakat setempat;  
d) Mengintegrasikan struktur dan metode  
pendidikan, menggabungkan kognitif, lan-  
jut, penelitian dan kreatif ke dalam  
sistem pendidikan pengembangan/materi  
ilif dan sosial.

Begitu makinnya perasaan guru bagi kemajuan bangsa ini, maka sebaiknya juga bagi seluruh pelajar bangsa untuk mempertahankan perasaan dan rasa hormat kepada guru. Baik itu yang berada di matematika maupun non-matematika, guna untuk meningkatkan rasa penghormatan dan penghargaan terhadap guru.

# Ayo Berantas Korupsi

**"BERANI JUJUR ITU HEBAT, merupakan semboyan yang diusung Indonesia dalam memperingati hari antikorupsi sedunia. Semboyan ini pada dasarnya merupakan ajakan moral bagi masyarakat Indonesia untuk memerangi korupsi sebagai musuh bersama."**

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.

RASA ini ingin meneluk gunung, saya daya tangan tidak sampai, hingga tidak kasih yang bisa diungkapkan melihat fenomena korupsi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Keinginan untuk bersih-bersih birokrasi dan korupsi semangat yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi pada kenyataannya belum melaksanakan korupsi di kalangan birokrasi tidak juga berhenti dan sejak itu bersamaan menjalani politisasi. Oleh karena itu, tidak bisa diungkapkan lagi kalau korupsi di Indonesia sangat identik dengan korupsi.

Secara umum dapatlah dipersamai bahwa korupsi di Indonesia sebenarnya telah mencapai sistematisasi politik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Di mana pemerintahan itu sendiri pada dasarnya menuntut atau diperlukan peran yang kuat pejabat pegawai negara dan bukan bukan bukan pegawai negara.

Undang Undang 43 Tahun 1999 mempersyaratkan bahwa pegawai negeri itu adalah orang-orang yang berseragam sebagai PNS (Pegawai Negara Sipil), anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan anggota KPK (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sedangkan birokrasi bukan pegawai negeri bukan orang-orang yang mem-



# Membangun Kota Pelajar

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.

**KOTA** pelajar adalah kotanya para pelajar. Sebuah kota dengan berbasis pendidikan, yang menggambarkan tingkat keterpelajaran penduduknya yang tinggi. Di mana masyarakat di sana memahami, bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap pendidikan merupakan dasar penting bagi mereka untuk merespon situasi lokal, nasional, regional, dan global yang

**KOTA** pelajar adalah sebuah kota yang dibangun dan dikembangkan dengan bertujuan pada wewasan yang berasal dari teori-teori pendidikan. Sebuah kota yang memiliki suasana dinamis dan hubungan harmonis dengan dunia pendidikan. Kota yang dapat menumbuhkan terjadinya proses interaksi belajar-mengajar yang maksimal bagi masyarakatnya. Kota

yang memahami bahwa pendidikan merupakan usaha suatu untuk mempersiapkan penduduknya, demi peranannya nanti dalam lingkup pergaulan bersosialitas. Ket yang menunjukkan bahwa pendidikan itu merupakan satu-satunya cara untuk memfasilitasi manusia, atau dengan kata lain adalah upaya utama untuk membangun manusia seutuhnya.

Untuk menciptakan sebuah kota menjadi kota pelajar, adalah bukan suatu hal yang mudah. Adanya komunitas yang kuat dan rasa optimis yang tinggi dari semua pihak, salah faktor penting untuk membangun suatu kota menjadi kota pelajar. Sarana-prasarana yang bermutu dan tenaga pendidik yang unggul, merupakan dua hal pokok yang harus tersedia demi berdirinya sebuah kota pelajar.

Menurut Sudiarwan (2010) sarana-prasarana yang harus ada guna menjamin keberadaan suatu kota pelajar, antara lain:

a) Tersedianya jenis dan jenjang pendidikan dengan beragam keahlian atau disiplin ilmu yang tidak hanya kompetitif, akan tetapi juga relatif sama dengan yang ditawarkan oleh remaja lain.

b) Tersedianya mutu proses dan hasil pendidikan yang secara risbi setara dengan atau sejajar yang

dicapai di tempat lain.

c) Tersedianya sumber daya internal dan eksternal pendidikan yang memenuhi kriteria jumlah dan kualitas.

d) Tersedianya pusat penjualan buku yang lengkap dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan,

e) Adanya pusat-pusat informasi yang lengkap, edukatif, dan representatif.

f) Tersedianya lingkungan belajar yang kondusif.

g) Adanya kondisi politik dan ekonomi masyarakat yang baik.

h) Tersedianya jaringan informasi yang bagus.

i) Adanya pemondonan dan biasa hidup yang relatif terjangkau.

j) Tersedianya sarana transparasi yang baik dan terjangkau.

k) Adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk kepentingan pendidikan.

l) Adanya pengakuan yang baik dari berbagai pihak atas hasil dari mutu pendidikan.

Sedangkan dari aspek tenaga pendidik, untuk menciptakan suatu kota pelajar yang berhasil. Sudiarwan (2010) berpandangan, bahwa pendidik haruslah memiliki kompetensi, berupa:

a) Kompetensi pedagogik (mampu memahami peserta didik secara mendalam; mampu merancang

pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; mampu melaksanakan pembelajaran; mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; dan mampu mengembangkan peserta didik untuk mengakualisasikan berbagai potensinya).

b) Kompetensi kepribadian (memiliki kepribadian yang mantap dan stabil; memiliki kepribadian yang arif; memiliki kepribadian yang berwibawa; dan memiliki akhlak yang mulia dan dapat dijadikan teladan).

c) Kompetensi sosial (mampu berkomunikasi dan bergaul secara arif dengan peserta didik; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; mampu berkomunikasi dan bergaul secara baik dengan orang tuanya/peserta didik dan masyarakat sekitar; dan yang paling penting, harus juga memiliki ketekunahan dalam menguasai struktu dan metode kilmuan).

Melalui keberadaan sarana-prasarana dan tenaga pendidik yang baik dan benar, diharapkan nantinya terciptalah suatu kota pelajar yang unggul. Guna untuk menghasilkan paradigma masyarakat yang cerdas, bener, jujur, dan amanah yang ikut berperan aktif dalam penyelesaian agenda negara, pemerintahan, dan pembangunan.<sup>14)</sup>

**DARI KECIL SUDAH  
TERBIASA TERIMA  
SUAP YA...**





# Idealisme Setengah Hati

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.

"CERDAS, benar, jujur, dan amanah begitulah sepatutnya sikap para birokrat dalam menjalankan tugas kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan yang dimilikinya."

**MENJADI** birokrat merupakan impian setiap orang ilmu di karenakan, adanya opini bahwa profesi sebagai birokrat merupakan pekerjaan yang menjajikkan. Pada dasarnya, birokrat merupakan unsur aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ejek, adil, dan merata dalam penannya sebagai penyelenggara tugas negara.

Secara umum, birokrat merupakan kewirausahaan yang tidaklah mudah. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi birokrat. Birokrat merupakan orang-orang terpilih, yang memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai penyelenggara pemerintahan.

Selanjutnya suatu pemerintahan yang baik (good governance), wajiblah dipimpin oleh birokrat yang netral. Yang mana birokrat tersebut, merupakan bagian dari masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan secara profesional, dalam fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, bahwa unsur unsur penting yang harus tergabung dalam suatu kepemimpinan birokrat yang merakyat antara lain: a) adanya wawasan kedepan, b) adanya keterbukaan dan transparansi, c) adanya partisipasi dari masyarakat, d) adanya tunggug gugat, e) adanya supremasi hukum, f) adanya demokrasi, g) adanya profesionalisme dan kompetensi, h) adanya daya tanggap, i) adanya keefisienan dan ketepatan, j) adanya desentralisasi, k) adanya kerjasama dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, l) adanya komitmen pada pengurangan kesenjangan, m) adanya komitmen pada lingkungan hidup, dan n) adanya komitmen pada pasar yang laik.

Menurut Socharyo dan Nesri (2003) untuk mewujudkan suatu kepemimpinan birokrat yang merakyat, adalah bukan suatu perkara yang mudah. Oleh karena, hal tersebut memerlukan dukungan dari beberapa faktor, yang diantaranya: a) adanya suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, b) adanya daya tarik yang laris dalam proses pelaksanaannya, c) adanya waktu yang tidak singkat dalam tahapan pembelajaran dan pemahamannya, d) adanya implementasi dari nilai-nilai tata kepemimpinan yang ada oleh seluruh elemen bangsa, dan e) adanya kesepakatan bersama dan rasa optimis yang tinggi; dari seluruh komponen bangsa.

Undang-Undang 43 Tahun 1999 memastikan, bahwa

birokrat itu sebenarnya adalah orang-orang yang berkerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan anggota KNPB (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Serta orang-orang yang memerlukan posisi sebagai presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat); ketua, wakil ketua, dan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); ketua, wakil ketua, dan anggota MA (Mahkamah Agung); ketua, wakil ketua, dan anggota DPA/Wartimpres (Dewan Perimbangan Agung/Dewan Perimbangan Presiden); ketua, wakil ketua, dan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan); menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan RI (Republik Indonesia) di luar negeri yang berkedudukan sebagi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/walikota; dan jajaran lainnya yang ditentukan undang undang.

Melihat gambaran yang ada, birokrat di Indonesia cakupan digelengkan menjadi tiga kelompok, yaitu: birokrat dari kalangan legislatif, birokrat dari kalangan eksekutif, dan birokrat dari kalangan yudikatif. Pernisahan birokrat ke dalam kelompok-kelompok ini, dimaksudkan untuk untuk menumbuhkan bangkit sikap saling awas mengawasi dan mencegah terjadinya praktik yang tidak benar dalam ranah birokrasi.

Dalam demokrasi seperti sekarang ini, birokrat yang pada

dasarnya merupakan bagian dari kohidupan bernegara tersebut sungguh sangat terisik. Persepsi hanya karya kaum birokrat (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang terbelenggu praktik korupsi, secara umum sebenarnya jalah menggarisbakan sikap para birokrat yang berjiwa tak murni atau dengan kata lain memiliki idealisme setengah hati. Para birokrat mulai dari tatasan yang terendah sampai dengan tatasan yang tertinggi, terindikasi terjebak dalam lingkaran korupsi. Kaum birokrat yang diberikan bertugas memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum, ternyata malah lebih menentingkan kepentingan individualnya.

Pengelolaan negara yang tidak jujur, merupakan faktor penting penyebab para birokrat terlibat sindikat pidana korupsi. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan uang dalam jumlah besar, dikelola oleh otoritas kerja yang terlalu gila untuk dapat dikorup. Tetapi saja akibat dari perbuatan tersebut, menyebabkan kualitas pelayanan dari pemerintahan menjadi tidak baik.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya para birokrat yang korup untuk disingkirkan. Keberhasilan pemberantasan korupsi di kalangan birokrat fokusnya adalah tetap pada kemauan bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan ketertiban. Dengan begitu, diperlukan niatnya tercipta atmopolitan birokrasi yang jujur dan bersih di Negara Indonesia yang tercinta ini. (\*)